

ABSTRAK

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan supaya suatu kebijakan mampu memperoleh sasarannya dan untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melakukan proses tawar menawar harga. Pasar Nagari Ujung Gading merupakan pasar tradisional yang memiliki permasalahan seperti fasilitas yang tersedia masih sangat sedikit dan belum memadai untuk mendukung aktivitas pasar secara maksimal. Banyak saluran drainase di sekitar Pasar Ujung Gading kini tertutup oleh lapak jualan, empat ibadah atau musala yang belum ada. Penataan pedagang di pasar nagari ujung gading saat ini tidak memenuhi standar yang sudah diatur oleh pemerintah tersebut dan masih semraut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat di fokuskan pada infrastruktur pasar, dan tata kelola pedagang dan untuk mengetahui penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Nagari Ujung Kabupaten Pasaman Barat difokuskan pada kendala kebijakan, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sarana prasarana di pasar masih sangat sedikit, seperti tidak tersedianya toilet umum, musala, drainase yang layak, dan area parkir yang memadai. Tata kelola pedagang juga belum sesuai dengan zona yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan kondisi pasar yang semrawut dan tidak tertib. Hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi kurangnya keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, lemahnya komunikasi antar pelaksana, serta rendahnya kesadaran pedagang terhadap aturan yang ditetapkan. Maka disarankan agar Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama pengelola Pasar Nagari Ujung Gading segera melakukan peningkatan dan perbaikan infrastruktur pasar, menetapkan aturan tertulis yang jelas mengenai zonasi dan tata letak pedagang, meninjau kembali kebijakan yang ada, dan penambahan staf administrasi pasar agar kegiatan pengelolaan pasar dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, pembinaan, pemberdayaan, dan Pasar Tradisional.*

ABSTRACT

Implementation of policy is the set of rules designed to ensure that a policy can achieve its objectives and to establish direction so that the goals of public policy can be realized as a result of government activities. Policy implementation can be applied in various contexts, including traditional markets. A traditional market is a place where sellers and buyers meet, negotiate prices, and conduct transactions after a bargaining process. Traditional markets carry historical value for their visitors, who enjoy the interactions between buyers and sellers, among buyers themselves, and among sellers. The government continues to face challenges in managing the organization of traditional markets to improve their arrangement, since traditional markets are highly favored by the public and play an important role in meeting the community's economic needs. The purpose of this study is to examine the implementation of the Policy on the Development and Empowerment of the Nagari Ujung Gading Traditional Market in Pasaman Barat Regency, focusing on market infrastructure and vendor management, as well as to identify obstacles to its implementation, particularly policy constraints and limited resources. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The theory used in this study is the Van Meter and Van Horn theory. The results show that policy implementation has not been optimal. Market facilities remain inadequate, such as the absence of public toilets, prayer rooms (musala), proper drainage, and sufficient parking areas. Vendor management also does not follow the designated zoning, resulting in a disorganized and untidy market environment. The main obstacles to implementing the policy include a lack of human and financial resources, weak communication among implementers, and low awareness among vendors regarding the established regulations. Therefore, it is recommended that the Pasaman Barat Regency Government, together with the management of the Nagari Ujung Gading Market, immediately improve and upgrade market infrastructure, establish clear written rules on zoning and vendor layout, review existing policies, and add administrative staff so that market management activities can run more effectively.

Keywords: Policy Implementation, development, empowerment and Traditional Markets.